

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari pembangunan nasional, karena pembangunan nasional di Indonesia dilakukan agar mampu menciptakan pemerataan pendapatan daerah (wilayah) serta pertumbuhan ekonomi dari hasil pembangunan yang mampu menciptakan karakteristik yang dimiliki oleh daerahnya. Pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia serta rakyat di negara Indonesia yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki setiap individu dan kemajuan teknologi secara global.

Peningkatan pembangunan tersebut berfokus pada pembangunan ekonomi daerah. Dimana Pembangunan ekonomi daerah diadakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan produktifitas suatu sumber daya manusia maupun sumberdaya ekonomi secara optimal. Secara tidak langsung pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengelola sumber daya yang ada serta menciptakan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan (Lincon Arsyad, 1999).

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari tujuan pembangunan ekonomi salah satunya adalah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan peningkatan pendapatan suatu masyarakat dan juga pemerataan ekonomi dengan sebaik mungkin. Berbagai upaya pemerintah dilakukan sebagai suatu koordinasi pada pelaksanaan proses pembuatan keputusan yang lebih tertata dan lebih baik dalam jangka waktu yang panjang, juga tidak lain yaitu untuk memberikan arahan dalam pengendalian tingkat maupun laju pertumbuhan ekonomi pada variabel-variabel yang pokok diantaranya seperti pendapatan, tenaga kerja, konsumsi, saving, nilai ekspor, impor dan banyak lagi hal yang lainnya, semuanya disusun tidak lain agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan yang ditetapkan sebelumnya, semua yang dilakukan merupakan perencanaan pembangunan (*economic planning*) yang dibuat oleh pemerintah. (Todaro, 2000).

Otonomi daerah merupakan istilah yang dijadikan sebagai tolak ukur suatu sistem pemerintahan dalam membangun daerah yang dilakukan secara lebih serius oleh pemerintah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adanya landasan undang-undang tersebut agar mendapatkan keleluasaan daerah sehingga pemerintah mudah untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan akan terasa lebih mudah karena masyarakat lebih dekat dan mendapatkan akses yang jelas dalam pengontrolan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah tersebut juga mampu meningkatkan daerahnya secara lebih mandiri dengan pengembangan potensi dari kemampuan setiap individu ataupun masyarakatnya. Demikian juga digunakan sebagai program pembangunan yang dilakukan sesuai dengan minat atau keinginan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan dari daerahnya (*local needs*).

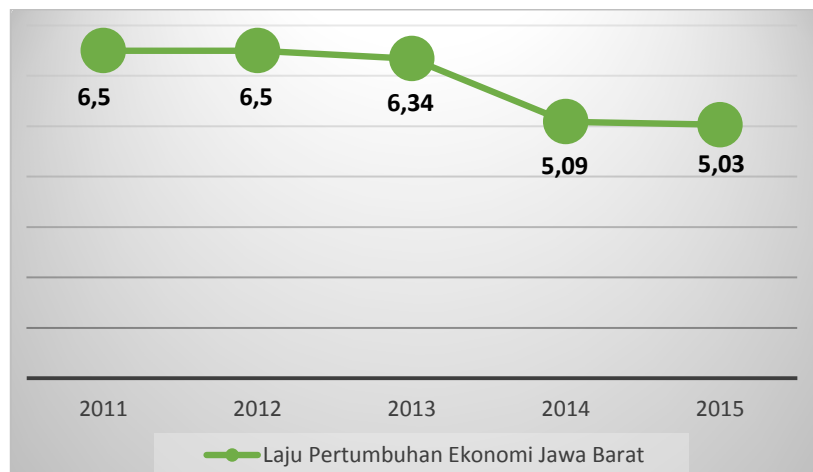
Pemerintah berperan semakin besar karena dituntut agar mampu lebih bekerja keras dalam menjalankan roda pemerintahan dalam pembangunan ataupun pengembangan ekonomi daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam mengelola rumah tangga, semua diadakan sejak adanya otonomi daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan perekonomian yang sering digunakan sebagai kemajuan tingkat perekonomian. Dengan demikian suatu sektor pengaruhnya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi, jika suatu sektor memiliki kontribusi yang cukup besar serta perkembangan atau pertumbuhannya sangat lambat maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika suatu

sektor berperan sangat cepat dalam pertumbuhannya maka sektor tersebut akan lebih cepat pula dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Jawa Barat merupakan suatu daerah yang memiliki potensi dalam berbagai tingkatan untuk pengembangan ataupun pembangunan suatu daerahnya. Perkembangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, wilayah tata kota, banyak juga industri dalam bidang pakaian sebagai icon Jawa Barat sudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga mampu untuk menunjang pembangunan daerahnya. Keseluruhan perekonomian Jawa Barat didukung oleh berbagai sektor yang dikatakan sebagai *leading sector*. Terlihat dari sumbangan terbesar untuk pembentukan PDRB Jawa Barat yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan.

Perekonomian Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau perlambatan yang terjadi pada tahun mencapai 5,03. Angka tersebut relatif lebih rendah dari tahun 2011 yang mencapai 6,5 persen. Penurunan atau perlambatan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh berbagai faktor yang menunjang perkembangan pembangunan dalam perekonomian, sehingga pengaruh yang ada dalam PDRB Provinsi Jawa Barat sangat diperhatikan setiap sektor dari berbagai daerah atau wilayah yang memiliki sumbangan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat.



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka

**GAMBAR 1.1.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat  
Tahun 2011-2015 ( persen )

Gambar 1.1 diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama tahun 2011-2015 yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yaitu sebesar 6,5 persen, konstan hingga tahun 2012 yaitu 6,5 persen, mulai dari tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,34 persen kemudian pada tahun 2014 tercatat penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 5,09 persen serta pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 5,03 persen.

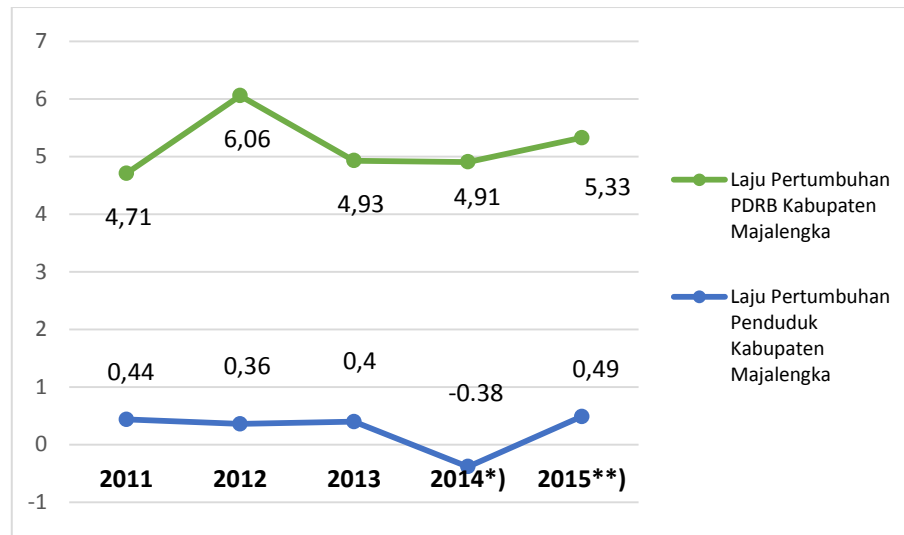
Kabupaten Majalengka merupakan salah satu dari kabupaten/kota yang ada di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan ibukotanya Majalengka, memiliki luas wilayah 1.204,24 km<sup>2</sup>, terdiri dari 26 kecamatan, yang terbagi atas 330 Desa dan 13 Kelurahan. Pusat pemerintah Kabupaten berada di Kecamatan Majalengka.

Keanekaragaman yang ada maka pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan pembangunan daerah, berdasarkan ketentuan otonomi daerah yang mengarahkan, mengelola serta mampu dalam memanfaatkan potensi untuk kemajuan tingkat pertumbuhan ekonomi secara optimal menggunakan sumber daya yang ada dengan kreatifitas ataupun prakarsa dalam pembangunan daerah agar mampu dirasakan kesejahteraannya oleh masyarakat.

Siklus ekonomi di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi setiap kurun waktu. Semuanya dikarenakan oleh jumlah produksi maupun perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka pada tahun 2011-2015 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 6,06 persen, sedangkan tahun 2014 mencapai 4,91 persen, sedangkan pada tahun 2013 yaitu 4,93 persen. Hal tersebut mengalami perlambatan dikarenakan menurunnya produksi minyak mentah serta gas bumi.

Berbeda halnya jika membandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 pertumbuhan ekonominya mencapai 5,33 persen hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk Majalengka mengalami tingkat yang semakin produktif,

karena berada pada posisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun pertumbuhan penduduk yang rendah, dapat terlihat dari gambar 1.2.



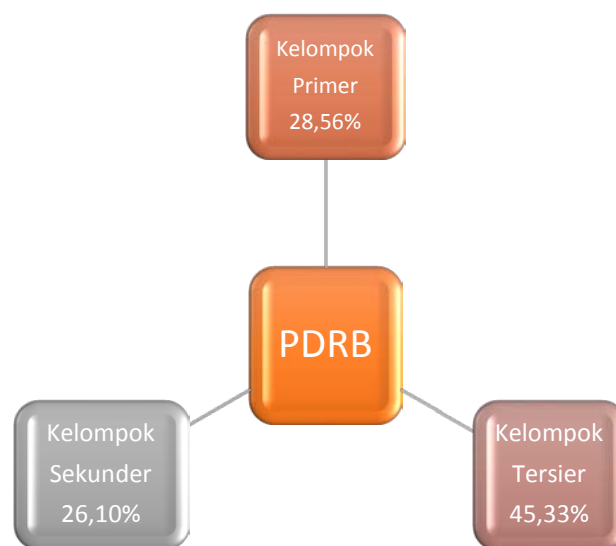
Sumber: BPS Kabupaten Majalengka

**GAMBAR 1.2.**  
Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2015 ( persen )

Terdapat beberapa lapangan usaha yang menunjukkan struktur dari perekonomian suatu daerah semuanya dapat terlihat dari data presentase PDRB kelompok lapangan usaha yang dibagi menjadi tiga kelompok lapangan usaha. Kelompok lapangan usaha primer yang terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Pertambangan dan Penggalian.

Kemudian kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, Pengadaan Air, Konstruksi. Selanjutnya kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari

lapangna Usaha Pedagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa yang Lainnya.



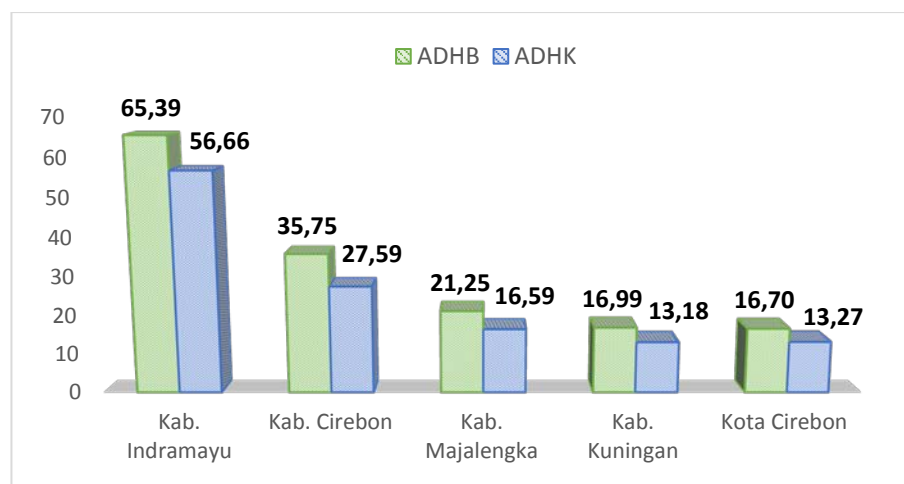
Sumber: BPS Kabupaten Majalengka

**GAMBAR 1.3.**  
Peranan Kelompok Sektor Ekonomi  
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ( persen )

Dilihat dari perubahan struktur lapangan usaha selama periode tahun 2011-2015 masyarakat Kabupaten Majalengka telah mengalami pergeseran lapangan usaha yang cukup besar dari lapangan usaha sekunder ke tersier yang dapat dilihat dari gambar 1.3 yang memiliki peranan masing-masing terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Majalengka. Kelompok lapangan usaha tersier pada tahun 2015 memberikan sumbangan yang cukup besar



yaitu mencapai 45,33 persen, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 45,11 persen. Kemudian kelompok usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 26,10 persen yang mengalami kenaikan dari tahun 2011 yaitu 23,37 persen. Selanjutnya yaitu kelompok lapangan usaha primer sebesar 28,56 persen ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 hanya menyumbang sebesar 31,48 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka

**GAMBAR 1.4.**  
Perbandingan PDRB di Wilayah Ciayumajakuning  
Tahun 2015 (triliun rupiah)

Gambar 1.4 memperlihatkan perbandingan diantara kabupaten/kota dari wilayah Ciayumajakuning menunjukkan bermacam segi yang tidak terlalu besar dari beberapa indikator yang terpilih untuk digunakan sebagai pembentukan pada PDRB Jawa Barat. Dijelaskan mulai dari ketimpangan yang sangat besar dari data di atas yang diperoleh dari hasil PDRB ADHB. Tercatat kontribusi yang besar diperoleh dari wilayah Indramayupada tahun

2015. Sedangkan yang terendah yaitu wilayah Kota Cirebon dan posisi Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 yaitu Rp. 21,25 triliun.

Mengacu pada tujuan pembangunan ekonomi yang dilihat dari amanat konstasuti: menuntun masyarakat agar mampu memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan serta menjaga keseimbangan sosial ekonomi kearah yang lebih baik. Untuk membangun tatanan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta membangun kehidupan perekonomian yang kuat dengan cara pemberdayaan ekonomi daerah diutamakan pada peningkatan pembangunan dari masyarakat daerah yang mampu menunjang pemerintahan daerahnya serta negara. Dengan demikian hal tersebut merupakan upaya dalam mengetas tingkat kemiskinan,menurunkan tingkat kematian serta pengangguran, kemudian agar mampu mencapai pendidikan dasar hingga universitas, yang selanjutnya mampu menjamin kelestarian hidup masyarakat yang lebih maju.

Meningkatan pendapatan daerah masing-masing ini dilakukan karena adanya desentralisasi agar mampu untuk menggali berbagai potensi daerah dan juga pemakaian potensi yang telah ada. Masyarakat akan lebih berusaha dengan meningkatkan perekonomian dengan alur yang tepat.Mempercepat pertumbuhan daerah salah satunya dapat dilakukan dengan penetapan spesialisasi terhadap suatu komoditas yang cocok dengan sektor unggulan yang dimiliki daerah tersebut.

Alasan penulis memilih Kabupaten Majalengka sebagai objek penelitian dikarenakan wilayah atau daerah Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang masih perlu pengembangan serta daerah yang cukup potensial bersaing dengan pasar ekonomi dengan mengembangkan berbagai produk dalam sektor-sektor unggulan yang menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Diantara daerah-daerah kecil lainnya yang ada di Tatar Pasundan Jawa Barat, Kabupaten Majalengka juga cukup kompetitif dalam pertumbuhan serta perkembangan daerahnya. Kabupaten Majalengka memiliki Berbagai sektor potensial yang dapat dijadikan unglan, dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar lebih meluas, merata dan lebih dekat dalam pembangunan pemerintahan daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih intensif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis terdorong untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai **“Analisis Sektor Unggulan Guna Mendorong Pembangunan Daerah dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka Tahun 2010 – 2015)”**.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Ruang lingkup ekonomi daerah yang sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah pada sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Majalengka dan data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Sektor basis dan non basis apa saja yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka?
2. Sektor apakah yang memiliki potensi keunggulan kompetitif serta spesialisasi di Kabupaten Majalengka?
3. Sektor manakah yang dipakai untuk mendorong pengembangan pembangunan ekonomi daerah yang maju dan tumbuh cepat, sedang tumbuh, maju tapi tertekan, dan tertinggal di Kabupaten Majalengka?
4. Bagaimanakah strategi pengembangan produk unggulan dan non unggulan untuk pembangunan di Kabupaten Majalengka?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis ataupun non basis untuk menunjang pertumbuhan pengembangan ekonomi daerah dengan analisis *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP) serta *Overlay* di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui sektor yang memiliki keunggulan kompetitif serta spesialisasi dengan analisis *Shift Share* di Kabupaten Majalengka.

3. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mendorong pengembangan pembangunan daerah dengan analisis *Klassen Typology* di Kabupaten Majalengka.
4. Untuk mengetahui strategi kebijakan dalam pembangunan daerah berbasis sektor unggulan daerah dan non unggulan dengan analisis SWOT di Kabupaten Majalengka.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan agar bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Mendapat penambahan wawasan tentang perihal yang diteliti kemudian mampu membandingkan teori yang diterima selama bangku perkuliahan dan dalam praktek secara langsung di lapangan.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian serta mengetahui berbagai sektor-sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Majalengka.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan penambahan informasi mengenai kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Majalengka.

#### 4. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran serta dapat memberikan masukan dalam hal penentuan kebijakan atau rencana kerja pemerintah daerah terutama dalam bidang ekonomi daerah.